

ABSTRAK

Optimalisasi kebijakan publik di tingkat desa menjadi elemen strategis dalam mempercepat penurunan stunting, khususnya di wilayah dengan tingkat prevalensi tinggi seperti Kabupaten Aceh Utara. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 45 Tahun 2021 hadir sebagai bentuk intervensi struktural yang menempatkan gampong sebagai aktor utama dalam pelaksanaan program penanganan stunting secara terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi implementasi Perbup tersebut di Kecamatan Sawang dengan fokus pada pelaksanaan kebijakan di tingkat desa serta identifikasi hambatan-hambatan yang memengaruhi efektivitas intervensi. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Grindle dalam Subarsono (2005) mengemukakan bahwa variabel utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu kemampuan pelaksanaan kebijakan itu sendiri dan pencapaian hasil akhir (*outcomes*). Untuk teknik analisis data digunakan metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perbup Nomor 45 Tahun 2021 memberikan arah kebijakan yang jelas dalam enam bidang intervensi utama, yaitu pelayanan kesehatan ibu dan anak, kesehatan remaja, perbaikan gizi, sanitasi dan air bersih, perlindungan sosial, serta pendidikan anak usia dini. Implementasi di Kecamatan Sawang menunjukkan hasil yang beragam antar gampong, dengan sebagian desa berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan, sementara yang lain masih menghadapi stagnasi atau peningkatan kasus. Faktor pendukung meliputi peran aktif kader dan dukungan kepala desa, sedangkan hambatan utama terletak pada lemahnya perencanaan, dominasi anggaran untuk infrastruktur fisik, rendahnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan kapasitas aparatur gampong. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan enam langkah strategis guna memperkuat implementasi kebijakan: (1) perkuat pelatihan dan pendampingan teknis bagi kader dan aparatur gampong, (2) integrasikan program stunting ke dalam dokumen perencanaan desa, (3) tingkatkan alokasi dana desa untuk program gizi dan kesehatan, (4) fasilitasi koordinasi lintas sektor secara rutin dan terstruktur, (5) libatkan tokoh masyarakat dalam sosialisasi, dan (6) bangun sistem pemantauan dan evaluasi berbasis data.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Stunting, dan Peran Gampong*

ABSTRACT

Optimizing public policy at the village level has become a strategic element in accelerating stunting reduction efforts, particularly in areas with high prevalence rates such as North Aceh Regency. The Regent Regulation of North Aceh Number 45 of 2021 serves as a form of structural intervention that positions the *gampong* (village) as the central actor in the integrated implementation of stunting reduction programs. This study aims to analyze the optimization of the regulation's implementation in Sawang Subdistrict, focusing on the execution of the policy at the village level and identifying the barriers that affect the effectiveness of the intervention. The research adopts a qualitative descriptive approach, employing data collection techniques such as in-depth interviews, field observations, and document analysis. The theoretical framework is based on Grindle's theory, as cited in Subarsono (2005), which asserts that the success of public policy implementation is influenced by two main variables: the capacity for policy execution and the achievement of final outcomes. The data analysis techniques used in this study include data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that Regulation Number 45 of 2021 provides a clear policy direction across six key areas of intervention: maternal and child health services, adolescent health, nutrition improvement, sanitation and clean water, social protection, and early childhood education. Implementation across villages in Sawang Subdistrict shows varied results—some *gampong* have achieved significant reductions in stunting rates, while others continue to experience stagnation or even an increase in cases. Supporting factors include the active role of health cadres and the commitment of village heads. In contrast, key obstacles consist of weak planning, budget dominance for physical infrastructure, low community participation, and limited capacity among village officials. Based on these findings, the study recommends six strategic steps to strengthen policy implementation: (1) strengthen technical training and assistance for health cadres and village officials; (2) integrate stunting programs into village planning documents; (3) increase village budget allocation for nutrition and health programs; (4) facilitate regular and structured cross-sectoral coordination; (5) involve community leaders in public outreach; and (6) establish a data-based monitoring and evaluation system.

Keywords: Policy Implementation, Stunting, and Village Role